



**PERGERAKAN PEMBAHARUAN SEJARAH POLITIK ISLAM DI  
PAKISTAN**

**Fitriani**

Universitas Serambi Mekkah  
[fitriani@serambimekkah.ac.id](mailto:fitriani@serambimekkah.ac.id)

**Badratun Nafis**

Universitas Serambi Mekkah  
[badratunnafis@serambimekkah.ac.id](mailto:badratunnafis@serambimekkah.ac.id)

**Ida Hasanah**

Universitas Serambi Mekkah  
[idahasanah@serambimekkah.ac.id](mailto:idahasanah@serambimekkah.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to trace the history of Islam in Pakistan and to examine the reform ideas of Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal and Muhammad Ali Jinnah. Political development in Pakistan was quite high due to frequent upheavals, crises and military coups in the first few years of its formation and the years that followed. The inability of the leaders to manage the government resulted in riots in various regions and ever-changing political movements. Under Ali Butto, the system of government was changed from Islamic to secular, which led to disappointment with Butto's leadership and ended in a military coup. In the next development during the Zia Ul-Haq era, there was development in all aspects of life that could improve governance and change back to an Islamic ideological system. Data collection in this research uses the documentation method. The main data sources were obtained through literature studies and other studies that have relevance to the research topic. Then the data obtained were analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions.*

**Keyword:** *Movement, Politic, Pakistan*

**Abstrak**

*Kajian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah politik Islam di Pakistan dan untuk mengkaji ide-ide pembaruan Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Perkembangan politik di Pakistan cukup tinggi karena pergolakan, krisis, dan kudeta militer yang sering terjadi pada beberapa tahun pertama terbentuk dan tahun-tahun berikutnya. Ketidakmampuan para pemimpin dalam mengelola pemerintahan mengakibatkan kerusuhan di berbagai daerah dan gerakan politik yang selalu berubah-ubah. Di bawah kepemimpinan Ali Butto, sistem pemerintahan diubah dari Islam menjadi sekuler, yang menimbulkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Butto dan berakhir dengan kudeta militer.*

*Pada perkembangan selanjutnya pada masa Zia Ul-Haq, terjadi pembangunan segala aspek kehidupan yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mengubah kembali ke sistem ideologi Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Sumber data utama diperoleh melalui studi literatur dan penelitian-penelitian lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.*

**Kata Kunci:** *Pergerakan, Politik, Pakistan*

## **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Pemerintah India. Peristiwa ini secara internal dipicu oleh gerakan Sayyid Ahmad Khan untuk reformasi intelektual dan pendidikan dan seruannya untuk hak-hak Muslim India. Gerakan ini secara tidak langsung menyebabkan munculnya kelompok-kelompok revivalis Islam seperti yang dipimpin oleh Maulana Mahmud al-Hasan, Doeband Qasim Nanautvi, dan Mujahidin Sayyid Ahmad Syahid melalui ghirah al-Islamiyah. Ketika gerakan jihad bersenjata untuk memulihkan politik Muslim-India dimulai, gerakan Doeband dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya berusaha membantu Muslim India dalam melestarikan tradisi Islam kuno Kesultanan Mughal. Munculnya Gerakan Khilafat Ali pada akhir tahun 1920-an membantu mendorong gerakan ini. (Auliahadi, 2018)

Liga Muslim-India adalah sebuah entitas politik yang berbeda yang didirikan di Dhaka pada tahun 1906 oleh para elit Muslim berpendidikan Barat. Kelompok ini didirikan untuk membela hak-hak politik, sosial, budaya, dan hak-hak ekonomi umat Islam. Selain itu, kelompok ini juga mencegah operasi organisasi nasionalis Hindu yang berkembang biak dan dikhawatirkan, akan mencegah pelanggaran hak-hak Muslim India di masa depan. Umat Hindu garis keras memulai kampanye Shuddhi dan Sangathan pada saat yang sama ketika mereka memaksa umat Islam untuk memeluk agama mereka. Muslim India mengembangkan gerakan Tanzhim dan Tabligh sebagai tanggapan terhadap hal ini, serta konsolidasi dan dakwah. Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang lebih dikenal sebagai negara yang lahir dari semangat nasionalisme Islam. (Islam & Banjarmasin, 2021)

Pakistan juga dikenal sebagai negara yang kurang stabil dalam bidang politik. Pada tahun 1958 negara Pakistan dikuasai oleh aparat militer, pada masa pemerintahan Zia ul Haq, kekuasaan militer semakin meningkat. Hal inilah yang membuat dunia politik di Pakistan semakin keras. Partai-partai politik tidak berjalan secara efektif dan perempuan tidak diperbolehkan untuk aktif di dunia politik, sejak saat itu banyak terjadi kekerasan dan juga kudeta militer yang menjadi tradisi di Pakistan. (HM, 2011) Awal mula kekerasan dan kudeta militer terjadi pada masa Zia ul Haq yang menyebabkan dunia politik di Pakistan menjadi tidak stabil. Awal mula kekerasan dan kudeta militer terjadi pada masa Zia ul Haq yang menyebabkan dunia politik di Pakistan menjadi tidak stabil. Militer memegang banyak kekuasaan di negara tersebut, yang dibuktikan dengan banyaknya peperangan antara militer

dan sipil yang pada akhirnya mempengaruhi sejarah politik di Pakistan. Pakistan didirikan untuk memajukan perjuangan umat Islam. Muslim lain mungkin diharapkan untuk bersimpati, bahkan antusias. Namun, hal ini hanya dapat berhasil jika negara-negara Muslim lainnya memiliki pandangan yang sama tentang hubungan antara agama dan kebangsaan. Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang lebih dikenal sebagai negara yang lahir dari semangat nasionalisme Islam. (Ahadiya, 2022)

Pakistan juga dikenal sebagai negara yang kurang stabil dalam bidang politik. Pada tahun 1958 negara Pakistan dikuasai oleh aparat militer, pada masa pemerintahan Zia ul Haq, kekuasaan militer semakin meningkat. Hal inilah yang membuat dunia politik di Pakistan semakin keras. Partai-partai politik tidak berjalan secara efektif dan perempuan tidak diperbolehkan untuk aktif di dunia politik, sejak saat itu banyak terjadi kekerasan dan juga kudeta militer yang menjadi tradisi di Pakistan. Awal mula kekerasan dan kudeta militer terjadi pada masa Zia ul Haq yang menyebabkan dunia politik di Pakistan menjadi tidak stabil. Awal mula kekerasan dan kudeta militer terjadi pada masa Zia ul Haq yang menyebabkan dunia politik di Pakistan menjadi tidak stabil. Militer memegang banyak kekuasaan di negara tersebut, yang dibuktikan dengan banyaknya peperangan antara militer dan sipil yang pada akhirnya mempengaruhi sejarah politik di Pakistan. Pakistan didirikan untuk memajukan perjuangan umat Islam. Muslim lain mungkin diharapkan untuk bersimpati, bahkan antusias. Namun, hal ini hanya dapat berhasil jika negara-negara Muslim lainnya memiliki pandangan yang sama tentang hubungan antara agama dan kebangsaan. (Adib Abbiya Qowiyyudin & Moh. Azmi Fauzi, 2023)

Praktek pembunuhan politik di Pakistan lazim terjadi dikalangan politikus dan tidak pernah mendapatkan titik terang siapa aktor yang dibalik kasus pembunuhan tersebut. Akan tetapi beberapa dari para pengamat politik memandang bahwa militer dan aparat keamanan di Pakistan yang banyak memegang peran dibalik kasus pembunuhan tersebut, namun teroris akan menjadi salah satu faktor pengalihan isu tersebut. Pakistan adalah salah satu negara yang jumlah partisipasi politik lebih didominasi oleh kamu laki-laki dibandingkan perempuan. (Dosen et al., n.d.)

Wilayah yang didominasi Muslim di barat laut dan barat daya diganti namanya karena Liga Muslim, yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, menyadari bahwa kepentingan agama, budaya, dan politik komunitas Muslim di India tidak dapat dijamin keamanannya di wilayah India. Pakistan dan India. Setiap gerakan sepanjang sejarah Islam India telah berdampak pada sudut pandang Muslim kolektif, terlepas dari keragaman kelompok agama ini dan kompleksitas masalah yang mereka hadapi. Mereka mampu membagi dua busur sehingga sejajar dengan posisi orang Hindu. Mereka benar-benar memperburuk konflik antara dua kelompok agama, dan perpecahan inilah yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan Pakistan, sebuah negara Muslim. (Nursyamsi et al., 2022)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka dimana datanya didapatkan melalui studi dokumentasi terhadap sejumlah literatur yang dapat mengantarkan

kepada tujuan penelitian. Dalam artian studi Pustaka, data primer diperoleh dari primer dan skunder tentang pergerakan pembaharuan sejarah politik islam di Pakistan. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan pola interelasi data yang selanjutnya menjadi temuan dalam penelitian ini. Pergerakan Pembaharuan Sejarah Politik Islam Di Pakistan

## **KONSEP DASAR**

Secara umum, Pakistan merupakan wilayah yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di dunia dan juga dalam pemikiran pembaharuan Islam. Di Pakistan, Islam berperan penting dalam politik, budaya, dan kehidupan sehari-hari penduduknya. Perkembangan sejarah Islam di Pakistan membentuk landasan yang cukup kuat bagi kemajuan agama Islam di negara ini. Wilayah Pakistan memiliki keragaman budaya dan agama, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, negara ini merupakan negara yang memiliki sejarah yang panjang dan penting, yang meliputi masa kekuasaan Imperium Mughal dan perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Terbentuknya wilayah Pakistan merupakan proses yang sangat sulit karena ada banyak konflik politik dan sosial antara Muslim dan Hindu di India, yang menyebabkan timbulnya kekerasan besar-besaran dan migrasi massal.

Pada dasarnya jauh sebelum Pakistan berdiri, yaitu ketika Muslim India dan Hindu India masih berada di bawah satu kekuasaan, gerakan reformasi telah ada pada akhir abad ke-18 dengan tokohnya yaitu Syah Waliyullah dan dilanjutkan oleh Sayid Ahmad Khan yang kemudian diteruskan oleh Iqbal dan baru direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah. Dalam sejarah pemikiran dan gerakan (1975), Harun Nasution menjelaskan bahwa Muhammad Ali Jinnah adalah orang yang mampu mengimplementasikan gagasan yang telah dikonsep oleh Muhammad Iqbal mengenai pendirian negara Pakistan. Konsep pemikiran modern yang masuk ke dalam dunia Islam berawal dari adanya hubungan langsung antara Barat dan dunia Islam. Peristiwa tersebut terjadi ketika Napoleon menguasai Mesir pada tahun 1798. Diperkirakan sekitar tahun 1789 M, perjalanan ekspedisi Napoleon ke Mesir membawa ide-ide yang berasal dari revolusi Perancis, diantaranya adalah sistem pemerintahan republik, pembentukan parlemen dan konstitusi negara, ide persamaan hak warga negara dalam pemerintahan (egalite) dan ide tentang negara (nation). Adanya pengaruh modernisme Barat telah melahirkan ide atau gagasan para intelektual muslim tentang kemajuan dunia Timur.

Sementara itu, tokoh penyair dan filosof Muhammad Iqbal juga mengemukakan pendapatnya tentang terpusatnya kehidupan Islam melalui penciptaan negara Muslim di barat daya India. Ia mengatakan bahwa bagi Islam, negara otonom seperti itu bagi Islam, Negara otonom semacam itu akan berarti “sebuah kesempatan untuk menyingkirkan cap imperialisme Arab yang diberikan kepada Islam secara paksa, untuk menjajah diberikan kepada Islam secara paksa, untuk menjajah hukumnya, pendidikannya, budayanya, dan untuk membawanya ke dalam kontak yang lebih dekat dengan semangatnya sendiri dan juga semangat zaman modern.

Penerapan gagasan Pakistan oleh rakyat hanya dapat dicapai melalui berhasilnya Liga Muslim dalam menggerakkan sentimen keagamaan umat Islam India dan dalam menegaskan bahwa perjuangan untuk Pakistan adalah perjuangan untuk pelestarian dan kejayaan Islam. Pada saat gerakan pendirian Pakistan hampir terwujud, sifat terwujud, sifat kebangkitan agamanya sudah terlihat jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Perkembangan Islam di Pakistan**

---

Di masa lalu, Pakistan didasarkan pada dua ide atau model negara Islam. Elit politik ingin Pakistan menjadi negara Islam yang tidak memiliki substansi agama dan malah berfungsi sebagai kendaraan untuk identifikasi komunal dan politik nasional. Di sisi lain, mayoritas masyarakat, yang dipimpin oleh para ulama dan pemuka agama lainnya, mengantisipasi Pakistan akan berubah menjadi negara Islam di mana syariat Islam akan mendominasi semua aspek kehidupan sehari-hari. Ketika Pakistan menjadi negara merdeka, masalah pertama yang harus dihadapinya adalah bagaimana menegakkan otoritasnya atas Pakistan dan atas dasar apa ia harus didirikan. Meskipun ide-ide dan simbol-simbol agama digunakan untuk mendukung dan menyatukan tindakan yang dilakukan oleh umat Islam selama gerakan kemerdekaan, tidak ada pemahaman atau konsensus yang jelas tentang signifikansi positif ideologi dan implementasinya dalam struktur, program, dan kebijakan pemerintahan.

Di Pakistan, agama mayoritas adalah Islam, tetapi ada dua gagasan yang kontradiktif tentang apa yang dimaksud dengan "negara Islam". Elit politik yang benar-benar mewakili partai nasionalis sekuler percaya bahwa Pakistan harus dipandang sebagai negara Islam dengan identitas komunal, politik, dan nasional yang harus menghapus agama. John L. Esposito menggarisbawahi perlunya Pakistan menjadi negara-bangsa sekuler yang menganut prinsip-prinsip hukum Barat. Di sisi lain, mayoritas orang menginginkan pembangunan Pakistan dengan menggunakan hukum dasar, institusi, dan cara hidup berdasarkan hukum dan norma Islam, dipandu oleh ulama dan pemimpin agama lain yang mempromosikan kepentingan organisasi nasionalis Islam. (Barella et al., 2023)

Isu utama yang dihadapi Pakistan adalah bagaimana membantu rakyatnya mengembangkan rasa identitas nasional yang sesuai dengan realitas perbatasan politik baru dan bagaimana menciptakan pemerintahan yang stabil yang dihormati oleh warganya, yang datang dari berbagai latar belakang ras, ideologi, bahasa, dan bahkan agama. Oleh karena itu, terlepas dari kompleksitas ideologi, bahasa, dan etnis, upaya harus dilakukan untuk mengembangkan identitas dan rezim politik nasional yang dapat diterima oleh seluruh penduduk.

Pakistan didirikan dengan prinsip kuat bahwa populasi Muslim India membutuhkan platform bagi negaranya sendiri untuk memberikan keamanan bagi keberadaan politik dan kesempatan untuk mengadopsi budaya Muslim. Ada banyak konstitusi, administrasi sipil, dan rezim militer di Pakistan. Negara harus dipersatukan oleh kekuatan militer, kepemimpinan yang kuat, dan negosiasi yang

kuat antara berbagai kelompok, bukan atas dasar rasa identitas nasional yang kuat. (Serangan et al., n.d.)

Dale F. Eickelman dan James Piscatori berpendapat bahwa karena Islam dan identitas etnis telah diangkat ke puncak ideologi negara di Pakistan, masalah etnis telah mendominasi politik nasional. Menurut John Echol, suatu bangsa biasanya diidentifikasi oleh kesatuan geografis, susunan etnis, atau bahasanya. Pakistan didirikan sebagai negara asal bagi orang-orang dengan latar belakang sosial-keagamaan yang sama. Meskipun secara teknis merupakan bagian dari Pakistan, ia akan segera menjadi negara Muslim yang terdiri dari berbagai kelompok orang yang terpecah oleh berbagai bahasa yang mereka gunakan dan kesetiaan regional mereka yang kuat. Saat ini, Pakistan adalah negara Islam yang diakui, yang dilengkapi dengan sejumlah kewajiban. Dimulai dengan mempertahankan kebangsaan sebagai simbol kohesi negara Islam. Kesulitan kedua adalah mengintegrasikan Islam ke dalam negara dan ekonomi modern sambil bersaing dengan meningkatnya keragaman Muslim dalam hal etnis, suku, dan lokalitas serta dengan permusuhan dari elit nasionalis sekuler dan Muslim dengan mayoritas Hindu. (Fautanu, 2015)

### **Gerakan Politik Islam Jama'ah Islamiyyah di India dan Pakistan**

Pada tahun 1941, anak benua India-Pakistan melihat berdirinya Jama'ah Islamiyyah, juga dikenal sebagai Jami'at Islami. Abul A'la al-Maududi adalah pendiri dan filosof pertamanya (1903-1979). Dalam adab kontemporer, Al-Maududi dipuja sebagai mujaddid (pembaru) besar, dan gerakan yang dia mulai dipandang sebagai gerakan Islam yang signifikan dan mendunia yang masih kuat dan aktif. Undangan Maududi bagi para tokoh dan cendekiawan Islam India untuk menghadiri sidang di Lahore pada 26 Agustus 1941, menandai dimulainya proses pembentukan Jama'ah Islamiyyah. (Sekolah et al., 2017) Hingga 27 delegasi menerima undangan atas nama berbagai negara bagian India. Jama'ah Islamiyyah didirikan selama persidangan ini, dan al-Maududi dipilih untuk menjadi pemimpinya. Misi JI adalah menegakkan hukum Islam (iqamah ad-din) di semua bidang kehidupan, termasuk kebijakan publik (politik). Gerakan JI bekerja keras untuk memerangi beberapa jenis sekularisme, menantang dominasi peradaban Barat, memulihkan iman orang-orang yang imannya telah hilang, memperkuat ekonomi rakyat, dan mengubah sistem politik agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. JI mendukung Mujahidin Kashmir dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan dari India. (Auliahadi, 2018)

Sekularis Pakistan yang mendukung Barat seringkali menentang Jama'ah Islamiyyah (Amerika Serikat). Namun, JI mendapat dukungan substansial dari pemerintah selama pemerintahan Zia ul-Haq, yang menggulingkan kediktatoran Zulfikar Ali Bhutto, dan bahkan al-Maududi diberi gelar kewarganegaraan Zia ul-senior Haq. Hingga wafatnya pada 22 September 1979, kaum bangsawan disematkan. JI saat ini dianggap sebagai partai Islam paling berpengaruh di Pakistan, dan menjadi terkenal ketika Jenderal Musharraf mencuri kekuasaan Perdana Menteri Nawas Syarif pada 12 Oktober 1999. Kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah contoh bagaimana JI, yang Amerika Serikat dan sekutunya yang dianggap sebagai organisasi teroris global, akan terus berjuang

untuk penegakan hukum Islam. Ji saat ini dipimpin oleh Qazi Huseein Ahmad (NATO Barat dan Yahudi). Barat berpikir bahwa Ji telah berkembang tidak hanya ke Pakistan tetapi juga ke setiap negara di dunia Islam, termasuk Indonesia. Ji terus-menerus dikaitkan dengan volume insiden "teror" yang terjadi di negara-negara di mana Muslim merupakan mayoritas penduduknya. Parahnya lagi, dengan kedok memerangi terorisme, aparat keamanan negara setempat ikut serta dalam pemberantasan gerakan kelompok Islam seperti yang dipersepsikan Amerika Serikat (barat). (Hj Aisyah, 2014)

#### Pertimbangan dan Usulan untuk Republik Islam Pakistan

Ada beberapa tokoh yang membantu Pakistan memperoleh kemerdekaannya, antara lain sebagai berikut :

1. Sayyid Ahmad Khan, Konsep komunalisme diciptakan oleh Sayyid Ahmad Khan. Menurut sudut pandang ini, umat Islam di anak benua India harus berkumpul sebagai komunitas yang terpisah. Hal ini dilandasi oleh adanya tiga kekuatan sosial yang kuat: Islam sebagai komunitas minoritas, Hindu sebagai komunitas mayoritas, dan Inggris sebagai penguasa politik dan pemerintahan.
2. Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal kemudian dimotivasi oleh konsep Sayyid Ahmad Khan untuk membangun negara Islam Pakistan. Menurut Muhammad Iqbal, Muslim dan Hindu merupakan dua budaya dan gaya hidup yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dari cara orang berpakaian, makan, membaca, dan berpikir. Umat Islam mampu menjunjung tinggi budaya Islam dan melindungi sesama umat Islam meskipun menjadi komunitas minoritas. Lebih jauh lagi, umat Islam tidak ingin menjadi minoritas di negara yang mayoritas beragama Hindu. Umat Islam mendapat sedikit perhatian dari pihak berwenang. Pemerintah benar-benar menunjukkan lebih banyak dukungan untuk mayoritas Hindu daripada minoritas Muslim. (Punjab et al., 2023) Muslim tergerak oleh ini untuk mendukung seruan Liga Muslim Ali Jinnah untuk kemerdekaan negara bagian India. Muhammad Iqbal juga menggarisbawahi pentingnya negara khusus Muslim. Dia mengklaim bahwa Islam dan Hindu adalah dua agama utama di India. Tujuan utama umat Islam dalam perjuangan nasional India secara resmi ditetapkan sebagai tahun 1930.(Wulandari, 2021)
3. Muhammad Ali Jinnah, Dengan menemukan strategi inovatif untuk memerangi bangsa yang buruk, Muhammad Ali Jinnah mencerminkan gagasan Muhammad Iqbal. Untuk mendapatkan dukungan, Muhammad Ali Jinnah bersatu dengan berbagai daerah. Muhammad Ali Jinnah memperbaiki konstitusi organisasi yang lebih demokratis dan membentuk kelompok untuk berpartisipasi dalam pemilihan dewan nasional dan provinsi di India pada pertemuan tahunan Liga Muslim pada tahun 1936.(Universitas et al., 2015) Pakistan telah dijanjikan kemerdekaan oleh pemerintah Inggris sejak 1942. Sidang Mahkamah Konstitusi akan diadakan sebelum diberlakukan. Muhammad Ali Jinnah mengomunikasikan dua gagasan penting tentang negara baru pada tahun 1944. Yang pertama adalah lokasi geografis Pakistan. Sistem pemerintahan demokrasi adalah yang kedua. Sidang Dewan Konstitusi 14 Agustus 1947 dimulai pada 15 Agustus 1947. Ali Jinnah menjabat sebagai presiden pertama Pakistan ketika negara itu dideklarasikan sebagai negara

merdeka dan negara Islam. (Sri Mulyati, Syamzan Syukur, 2023)

Pemerintahan negara Pakistan merupakan sebuah pemerintahan federal yang berdiri dan didirikan oleh konstitusi Pakistan sebagai kepentingan atau otoritas pemerintahan yang terkonstitusi dari 4 provinsi yang berakar dari sebuah republic demokrasi parlementer yang didirikan dan diproklamasikan secara konstitusional, dan pada era ini seringkali disebut dengan Republik Islamis Pakistan. (Nugroho et al., 2019) Sistem yang diberlakukan di negara ini berupa sistem Westminster yang mana diefektifkan demi kepentingan negara. Pakistan memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang utama yakni, Eksekutif, Legislatif dan juga Yudikatif. Dengan 3 macam sistem kewenangan ini dapat diartikan bahwa seluruh kekuatan terletak dibawah naungan Konstitusi, Parlemen, Perdana Menteri dan Dewan Tertinggi. Pasca perolehan akan kemerdekaannya, Pakistan mengalami beberapa keadaan politik dan pemerintahan seperti:

1. Jalan pemerintahan Pakistan pernah diwarnai oleh krisis yang ditunjukkan dengan keterlibatan militer serta kelompok etnis di dalamnya
2. Adanya Otoritarianisme yang mana kekuatan eksekutifnya lebih mendominasi dengan fase yang panjang, dan melibatkan darurat militer sehingga menimbulkan perpecahan yang mana seringkali menjadi isu di negara ini
3. Krisis pemerintahan yang terjadi disebabkan oleh krisis kepemimpinan nasional (tidak jujur sehingga tidak dapat dipercaya). (Bharata et al., 2023)

### **Ideologi Negara Islam**

Semua aspek kehidupan, termasuk agama, dipengaruhi oleh demokrasi setelah diadopsi sebagai sistem administrasi dalam suatu negara. Agama dan prinsip demokrasi tidak selalu hidup berdampingan di negara-negara Islam, khususnya Pakistan. Terlepas dari kenyataan bahwa Islam dan demokrasi memiliki ideologi yang terpisah, nilai-nilai demokrasi pada umumnya serupa atau konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip yang terkait dengan keadilan dan penegakan hukum adalah di antaranya. (Lubis, 2019) Pembentukan negara Pakistan memainkan peran penting dalam pertumbuhan individu dan komunitas, yang tidak mungkin dilakukan di bawah kekuasaan asing atau Hindu. Islam adalah upaya membangun ideologi dan kepribadian yang mengesahkan struktur sosial baru berdasarkan prinsip dan cita-cita Islam. Pemerintah Pakistan pada awalnya memasukkan gagasan Islam ke dalam pemerintahannya. (Armansyah & Aziz, 2023)

Menurut undang-undang tahun 1940, yang mengamanatkan bahwa Pakistan, sebuah negara Islam, harus mematuhi Al-Qur'an dan Hadits, hal ini ditetapkan. Selain itu, ada masalah tambahan dengan mendefinisikan identitas nasional dalam kaitannya dengan struktur negara. Formulasinya memiliki dua tren utama. Yang pertama adalah negara tradisional yang didirikan berdasarkan hukum Islam. Negara bangsa kontemporer berdasarkan hukum barat adalah yang kedua. Akibatnya, para pemimpin politik dan agama dalam pemerintahan menjadi tidak terorganisir. Menurut konstitusi Pakistan, yang akhirnya terbentuk setelah melalui banyak pertimbangan, Republik Islam Pakistan adalah negara demokrasi yang berdasarkan cita-cita Islam. (Suyitno, n.d.)

## **Bentuk Pemerintahan Demokratis**

---

Sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist, undang-undang yang disahkan Liga Muslim pada tahun 1940 mencakup konsep demokrasi, hak atas kebebasan, persamaan, toleransi, dan keadilan sosial. Bentuk pemerintahan yang diusulkan kemudian diterima dalam konstitusi Pakistan pada tahun 1959. Menurut konstitusi, negara ini dikenal sebagai Republik Islam Pakistan. (Haq, 2022) Republik Pakistan dibentuk ketika konstitusi Pakistan direvisi pada tahun 1962 dan kata Islam dihapus dari nama negara. Lembaga Penelitian Islam dan Dewan Penasehat Ideologi Islam juga didirikan untuk memberikan kontribusi penjelasan rasional tentang isu-isu sentral Islam dan untuk mendorong pengembangan karakter dinamis dalam kaitannya dengan kemajuan intelektual dan ilmiah seperti di dunia modern. (Haq, 2022)

Demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan demokrasi dan penerapan syariat Islam, yang dijabarkan dalam 14 poin dasar, sebagai jawaban atas gesekan revisi konstitusi ini di kalangan ulama, ulama, mahasiswa, dan sejumlah partai politik. Pembentukan komisi Islam yang terdiri dari lebih banyak ulama untuk menasihati majelis provinsi, rekonstruksi lembaga penelitian Islam dengan hanya ulama sebagai anggota, pengenalan pendidikan Islam, penggunaan radio Pakistan untuk dakwah Islam, pencabutan non- Hukum Islam, penghapusan riba, reorganisasi Departemen Wakaf di bawah arahan ulama, dan lain sebagainya adalah beberapa di antaranya. Pemakzulan Presiden Ayub Khan menjadi tanda bahwa kampanye politik ini berhasil. (Futura, 2008)

Zulfikar Alu Bhutto, seorang politikus sekuler dengan kecenderungan sosialis, menggantikan Ayub Khan. Ali Bhutto berkontribusi pada sistem politik dan sosial Pakistan menjadi lebih Islami. Melalui nasionalisasi dan reformasi hukum, ia mengejar reformasi sosial ekonomi. Ali Bhutto berusaha memadukan cita-cita egaliter dan keadilan sosial Islam dengan sosialisme. Sebuah konstitusi yang dibuat pada tahun 1973, di bawah pemerintahannya, memiliki banyak ketentuan yang sama dengan yang telah diadopsi pada tahun 1962. Ali Bhutto mengembangkan hubungan dengan komunitas Islam secara keseluruhan serta dengan negara- negara Arab. (Ahadiya, 2022)

Jenderal Zia ul Haq melakukan kudeta pada tanggal 5 Juli 1977. Dia melakukan program Islamisasi yang lebih menyeluruh dan berusaha untuk memberlakukan norma-norma syariah melalui pembentukan komite dan lembaga untuk mengumpulkan zakat dan pajak, penggunaan hukum pidana Islam di pengadilan, penghapusan rida dalam sistem perbankan, dan revisi undang-undang. Kurikulum sekolah dan universitas untuk mencerminkan prinsip-prinsip Islam. (Indonesia, 2021)

## **PENUTUP**

---

Pakistan tidak dapat dipisahkan dari keadaan dan kondisi yang melingkupinya karena merupakan negara Islam. Situasi yang berkaitan dengan geografi, masyarakat, agama, dan politik, misalnya. Bangsa ini, yang kemudian dikenal sebagai Pakistan

Barat dan Pakistan Timur, pada awalnya terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan oleh India dengan jarak sekitar 1000 mil. Negara pertama yang menerima pengakuan resmi sebagai republik Islam adalah Pakistan. Negara demokrasi yang didirikan di atas nilai-nilai keadilan sosial Islam menjadi landasan konstitusinya. Sepuluh tahun pertama keberadaan Pakistan diwarnai dengan persoalan identitas dan ideologi nasional. Keinginan umat Islam di India untuk menciptakan sebuah negara di mana mereka bisa hidup di bawah pedoman hukum Islam memunculkan lahirnya Pakistan. Berbagai isu baru muncul sebagai akibat dari kemerdekaan Pakistan. Pada awalnya, ada masalah dengan bagaimana administrasi pemerintahan diatur. Isu pengembangan identitas nasional dengan mengacu pada struktur negara adalah berikutnya. Kaum modernis menginginkan negara modern, sedangkan kaum tradisional menginginkan negara Islam. Butuh waktu yang sangat lama bagi semua orang untuk sampai pada pemahaman bahwa Pakistan adalah negara Islam. Prinsip dasar Islam adalah pertama bahwa negara ini adalah sebuah republik dengan nama Republik Islam Pakistan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi Pakistan dari tahun 1956. Kedua, Pakistan adalah negara Islam yang mempraktikkan demokrasi. Ketiga, presiden atau kepala negara harus beragama Islam. Keempat, “membangun kembali masyarakat Muslim di atas dasar Islam yang shahih” adalah amanat pusat penelitian. Kelima, klausa yang tidak menguntungkan menyatakan bahwa hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak dapat disahkan. Gerakan-gerakan sosial Islam yang berlangsung memasuki masa kejayaan, dan gerakan-gerakan yang berlandaskan syariat Islam berhasil mengubah iklim politik suatu bangsa. Karena jika masalah agama menjadi fokus perjuangan sebuah gerakan, pemerintah negara akan dituduh salah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

- Adib Abbiya Qowiyyudin, & Moh. Azmi Fauzi. (2023). Sejarah Islam Dan Politik Di Pakistan. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 2(2), 137–149. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1097>
- Ahadiya, I. A. (2022). Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 5(1), 17–36. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537>
- Armansyah, A. D., & Aziz, A. N. (2023). Perkembangan Tokoh dan Agama Islam di Pakistan. *Jurnal Studi Islm Dan Kemuhmadiyah*, 3(1), 25–38.
- Auliahadi, A. (2018). Sejarah Perjuangan Sheikh Mujiburrahman Dan Lahirnya Negara Pakistan. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 3798. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.71>
- Barella, Y., Kholifatun, U. N., Hasaruddin, H., & Syukur, S. (2023). Menelusuri Sejarah Islam di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah. *Intizar*, 29(2), 122–135. <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i2.20079>
- Bharata, W. S., Syukur, S., & Abd. Rizal, R. (2023). Sejarah Peradaban Islam di Pakistan dan Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(2), 494–504.

- Dosen, J., Ushuluddin, F., Agama, S., Imam, U. I. N., Padang, B., Gerakan, A., Muslimin, I., Kunci, K., & Islam, N. (n.d.). *GERAKAN NEO-REVIVALISME ISLAM*.
- Fautanu, I. (2015). *Pakistan sebagai Locus Pertarungan Ideologis antara Islam dan Sekularisme (Sebuah Tinjauan Sejarah) 1*. 1–25.
- Futura, I. (2008). *Islam dan terorisme*. VII(2), 49–59.
- Haq, A. D. (2022). *KEMUNCULAN ISLAM DI PAKISTAN DAN PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD ALI JINNAH*. 2(Desember), 31–43.
- Hj Aisyah. (2014). Nasionalisme Dan Pembentukan Negara Islam Pakistan. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 82.
- HM, S. (2011). Sejarah Evolusi Sunnah: Studi Pemikiran Fazlur Rahman. *Jurnal Al-Tahrir*, 11(1), 173–198.
- Indonesia, U. M. (2021). *MENYOAL GERAKAN SALAFI DI INDONESIA (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi) Wahyudin*. 2, 29–48.
- Islam, U., & Banjarmasin, N. (2021). *Pendidikan islam di pakistan*. 1(1), 1–14.
- Lubis, A. M. (2019). *Kontribusi muhammad iqbal terhadap india-pakistan tahun 1876-1938*.
- Nugroho, I. S., Pendidikan, P., Islam, A., & Tarbiyyah, F. (2019). *Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan Historis Peran Ali Jinnah*. 15(2), 201–218.
- Nursyamsi, Dedi, & Ibnu Rusydi. (2022). Upaya Legislasi Qanun Syari'ah Di India Dan Pakistan. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.1>
- Punjab, S., Malik, N. I., Bibi, A., & Tang, K. (2023). *The Effects of Financial Stress and Household Socio-Economic Deprivation on the Malnutrition Statuses of Children under Five during the COVID-19 Lockdown in a Marginalized Region of*. 1–19.
- Sekolah, H., Agama, T., Jl, R., No, M., Musi, S., Sumatera, B., Email, S., Mughal, K. I., Islam, U., Jinnah, A., Khan, S. A., Iqbal, M., Jinnah, M. A., Jinnah, A., Jinnah, M. A., Muslim, L., Jinnah, M. A., & Jinnah, A. (2017). *Perjuangan dan Pengaruh Muhammad Ali Jinnah Dalam Pembentukan Negara Pakistan The Struggle and Influence of Ali Jinnah in The Establishment of Pakistan*. 33(1), 28–53.
- Serangan, A., Terhadap, M., Di, P., & Tarobin, M. (n.d.). *ZIARAH DAN RELASI SUNNI-SYIAH*: XV(1), 1–24.
- Sri Mulyati, Syamzan Syukur, S. (2023). Perjuangan Muhammad Ali Jinnah. *SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*, 6(1), 18–32.
- Suyitno, A. (n.d.). *4. Amin Suyitno*. 21(2), 225–246.

Universitas, P., Negeri, I., & Jakarta, S. H. (2015). *BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)* Yulia Fatma.

Wulandari, F. (2021). Islam dan Demokrasi di Pakistan. *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7882>